

Analisis Konseptual Standar Pelaporan Keuangan Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Perusahaan

Sriwardany¹, Desi Asmawati², Dita Deviana Fadhilah³

¹⁻³ Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

Info Artikel

Article history:

Received May, 2026

Revised May, 2026

Accepted May, 2026

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Big Data Analytics, Creative Accounting, Standar Pelaporan Keuangan, Transparansi

Keywords:

Accountability, Big Data Analytics, Creative Accounting, Financial Reporting Standards, Transparency

ABSTRAK

Standar pelaporan keuangan merupakan instrumen normatif yang memiliki peran krusial dalam membentuk kualitas dan integritas informasi keuangan yang disajikan oleh entitas bisnis kepada para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual kontribusi standar pelaporan keuangan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Metode yang digunakan adalah *library research* dengan menelaah sepuluh sumber literatur ilmiah bereputasi yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026, bersumber dari basis data Google Scholar, SINTA, dan Scopus. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi standar pelaporan keuangan secara substantif memerlukan dukungan kompetensi sumber daya manusia yang memadai, sistem pengendalian internal yang kokoh, serta mekanisme *enforcement* hukum yang efektif dan konsisten. Praktik *creative accounting* teridentifikasi sebagai ancaman sistemik yang mampu mendistorsi transparansi meskipun secara formal perusahaan telah mematuhi standar yang berlaku. Di sisi lain, harmonisasi standar akuntansi global dengan nilai-nilai lokal serta adopsi teknologi *Big Data Analytics* menawarkan solusi transformasional yang menjanjikan. Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas korporat yang sejati hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan integratif yang secara simultan mencakup dimensi teknis, institusional, hukum, dan teknologi dalam satu kerangka yang kohesif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Financial reporting standards serve as normative instruments that play a crucial role in shaping the quality and integrity of financial information presented by business entities to their stakeholders. This study aims to conceptually analyze the contribution of financial reporting standards to enhancing corporate transparency and accountability, while simultaneously identifying the institutional factors that influence the effectiveness of their implementation. The method employed is library research, reviewing ten reputable scientific literature sources published between 2021 and 2026, sourced from Google Scholar, SINTA, and Scopus databases. The findings indicate that the substantive implementation of financial reporting standards requires adequate human resource competence, robust internal control systems, and effective and consistent legal enforcement mechanisms. Creative accounting practices are identified as a systemic threat capable of distorting transparency even when companies formally comply with prevailing standards. On the other hand, the

harmonization of global accounting standards with local values and the adoption of Big Data Analytics technology offer promising transformational solutions. This study affirms that genuine corporate transparency and accountability can only be achieved through an integrative approach that simultaneously encompasses technical, institutional, legal, and technological dimensions within a cohesive and sustainable framework.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Sriwardany, SE, M.Si

Institution: Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan, Indonesia

Email: sriwardany@umnaw.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dalam lanskap ekonomi global yang terus mengalami transformasi struktural, kebutuhan terhadap sistem pelaporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel menjadi semakin mendesak. Perusahaan-perusahaan, baik yang beroperasi di skala nasional maupun multinasional, dituntut untuk menyajikan informasi keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga mampu mencerminkan kondisi ekonomi entitas secara substansial. Standar pelaporan keuangan seperti *International Financial Reporting Standards (IFRS)* dan *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)* hadir sebagai kerangka normatif yang menjembatani kepentingan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), mulai dari investor institusional, regulator, hingga masyarakat luas. Namun demikian, efektivitas implementasi standar-standar tersebut dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan masih menjadi perdebatan akademis yang relevan hingga saat ini (Barth et al., 2023).

Transparansi keuangan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan merupakan fondasi kepercayaan publik yang menentukan kualitas hubungan antara perusahaan dengan ekosistem bisnisnya. Ketika sebuah entitas bisnis gagal menyajikan laporan keuangan yang memadai, dampak yang ditimbulkan bukan hanya bersifat finansial, tetapi juga merembet pada dimensi reputasional dan sosial. Beberapa skandal akuntansi berskala global yang terjadi dalam dekade terakhir seperti kasus manipulasi laporan keuangan oleh berbagai korporasi besar memperkuat urgensi kajian mendalam mengenai sejauh mana standar pelaporan keuangan benar-benar berperan sebagai mekanisme penjaga integritas informasi korporat (Dechow et al., 2021). Di sinilah relevansi konseptual penelitian ini menemukan pijaknya.

Tinjauan terhadap literatur yang berkembang dalam rentang tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pemahaman atas fungsi standar pelaporan keuangan. Sejumlah peneliti kontemporer tidak lagi memandang standar tersebut semata sebagai instrumen teknis akuntansi, melainkan sebagai konstruksi sosial yang sarat dengan dimensi institusional dan politis (Ahmed & Duellman, 2022). *Stakeholder theory* dan *agency theory* menjadi dua lensa teoretis yang paling sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dengan tingkat transparansi korporat. Selain itu, penelitian terkait *earnings management* dan *disclosure quality* semakin memperkaya pemahaman mengenai bagaimana perusahaan merespons tekanan regulasi sambil tetap mempertahankan fleksibilitas informasi yang menguntungkan manajemen (Healy & Wahlen, 2022).

Sejumlah studi terdahulu telah mengeksplorasi kaitan antara adopsi IFRS dengan peningkatan kualitas akuntansi di berbagai negara berkembang. Penelitian oleh Knezevic et al. (2021) mengidentifikasi bahwa adopsi penuh terhadap IFRS secara signifikan meningkatkan

komparabilitas laporan keuangan lintas negara, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas penegakan hukum (*enforcement*) di masing-masing yurisdiksi. Senada dengan itu, Zhang et al. (2026) menemukan bahwa tingkat *disclosure* yang tinggi berkorelasi positif dengan nilai perusahaan dalam konteks pasar modal yang sedang berkembang. Di sisi lain, penelitian Saeed et al. (2026) memberikan nuansa kritis dengan menunjukkan bahwa standar akuntansi yang kompleks justru dapat membuka celah bagi praktik *earnings management* yang lebih canggih, sehingga transparansi yang diharapkan tidak sepenuhnya tercapai.

Meskipun demikian, terdapat *gap* penelitian yang cukup signifikan dalam literatur yang ada. Sebagian besar studi berfokus pada analisis empiris berbasis data kuantitatif dengan sampel perusahaan publik di negara-negara maju, sehingga dimensi konseptual dan analisis literatur yang komprehensif khususnya dalam konteks kerangka regulasi di negara berkembang masih relatif terbatas (Harjanto, 2024). Selain itu, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif *institutional theory* dalam membahas bagaimana tekanan koersif, mimetik, dan normatif dari lingkungan institusional memengaruhi orientasi perusahaan dalam menerapkan standar pelaporan keuangan secara substansial, bukan sekadar formal (Budi & Sumarni, 2026).

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis konseptual-integratif yang mensintesis berbagai perspektif teoretis meliputi *agency theory*, *stakeholder theory*, dan *institutional theory* untuk membangun pemahaman yang lebih holistik mengenai peran standar pelaporan keuangan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas korporat. Pendekatan studi literatur (*literature review*) yang digunakan memungkinkan peneliti untuk memetakan lanskap pengetahuan yang ada, mengidentifikasi pola-pola konseptual yang belum terartikulasikan dengan baik, dan merumuskan proposisi teoretis baru yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian empiris selanjutnya.

Bertolak dari latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana standar pelaporan keuangan secara konseptual berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta faktor-faktor institusional apa yang memengaruhi efektivitas implementasinya? Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan konseptual standar pelaporan keuangan dalam hubungannya dengan transparansi korporat, mengidentifikasi *gap* dalam literatur yang ada, serta mengajukan kerangka konseptual integratif sebagai kontribusi orisinal terhadap ilmu akuntansi. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dirasakan secara akademis sebagai referensi konseptual bagi peneliti di bidang akuntansi dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), serta secara praktis sebagai masukan bagi regulator dan manajemen perusahaan dalam merancang kebijakan pelaporan yang lebih berorientasi pada substansi transparansi dan akuntabilitas yang sejati (Dewi et al., 2025)

2. TINJAUAN PUSTAKA

Setiap kutipan dari buku dikutip dalam teks, dan mengutip sumber dalam daftar pustaka. Kutipan dalam teks ditulis seperti ini: (Nama belakang penulis, tahun: halaman) atau (Nama belakang penulis, tahun) untuk sumber buku. Sedangkan kutipan untuk sumber online ditulis seperti ini: (Nama belakang penulis/editor/institusi, tahun posting).

2.1 Standar Pelaporan Keuangan

Standar pelaporan keuangan merupakan seperangkat prinsip, pedoman, dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Purba et al., 2025). Dalam konteks ekonomi modern yang semakin terintegrasi secara global, keberadaan standar pelaporan keuangan menjadi elemen penting dalam menciptakan keseragaman praktik akuntansi antarperusahaan maupun antarnegara (Rika et al., 2025). Standar ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Secara internasional, standar pelaporan keuangan yang paling banyak digunakan adalah International Financial Reporting Standards (IFRS) yang dikembangkan oleh International Accounting Standards Board (Anita, 2026). IFRS dirancang untuk meningkatkan komparabilitas laporan keuangan lintas negara sehingga memudahkan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi (Ramli et al., 2025). Di Amerika Serikat, standar yang digunakan adalah Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) yang disusun oleh Financial Accounting Standards Board. Sementara itu, di Indonesia penerapan standar pelaporan keuangan dilakukan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai bentuk konvergensi terhadap IFRS.

Kerangka konseptual pelaporan keuangan menjelaskan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, standar pelaporan keuangan menekankan pentingnya karakteristik kualitatif informasi keuangan, seperti relevansi, faithful representation, comparability, verifiability, timeliness, dan understandability. Karakteristik tersebut menjadi dasar dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh para pengguna informasi.

Dalam perkembangannya, standar pelaporan keuangan tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen teknis akuntansi, melainkan juga sebagai mekanisme institusional yang memengaruhi perilaku organisasi. Penerapan IFRS, misalnya, diyakini mampu meningkatkan kualitas informasi akuntansi melalui peningkatan transparansi disclosure dan pengurangan asimetri informasi antara manajemen dan investor (Alvionita et al., 2025). Barth et al. (2023) menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan standar pelaporan berbasis IFRS cenderung memiliki tingkat relevansi nilai informasi akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang menggunakan standar lokal yang kurang terintegrasi secara global.

Dalam perspektif tata kelola perusahaan, standar pelaporan keuangan memiliki peran strategis sebagai alat untuk membangun kredibilitas dan legitimasi perusahaan di mata publik. Informasi keuangan yang disusun sesuai standar dapat meningkatkan kepercayaan investor karena laporan yang dihasilkan dianggap lebih objektif, transparan, dan dapat dibandingkan. Oleh sebab itu, penerapan standar pelaporan keuangan yang berkualitas menjadi salah satu fondasi utama dalam menciptakan sistem corporate governance yang efektif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa standar pelaporan keuangan memiliki fungsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar pedoman teknis akuntansi. Standar tersebut merupakan instrumen penting dalam menciptakan transparansi, mengurangi asimetri informasi, meningkatkan akuntabilitas perusahaan, serta mendukung integritas sistem ekonomi secara keseluruhan.

2.2 *Transparansi*

Transparansi merupakan keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan (Putri et al., 2024). Transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan kepercayaan antara perusahaan dengan stakeholder. Informasi keuangan yang transparan akan membantu investor, kreditor, dan masyarakat dalam menilai kondisi perusahaan secara objektif (Fadilah et al., 2025).

Transparansi perusahaan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Transparansi mengacu pada keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang material, relevan, dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks pelaporan keuangan, transparansi diwujudkan melalui penyajian informasi keuangan yang jujur,

lengkap, tepat waktu, dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh investor, kreditor, regulator, maupun masyarakat umum (Ritonga, 2024).

Konsep transparansi berkembang seiring meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas korporasi di era globalisasi ekonomi. Perusahaan tidak lagi hanya dinilai berdasarkan kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga berdasarkan sejauh mana perusahaan mampu menyediakan informasi yang mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Transparansi menjadi penting karena adanya asimetri informasi antara manajemen sebagai pengelola perusahaan dengan pihak eksternal sebagai pengguna laporan keuangan. Dalam kondisi asimetri informasi, manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan investor atau pemegang saham, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan informasi.

Dalam perspektif Agency Theory, transparansi dipandang sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan antara principal dan agent (Putri & Yustisi, 2022). Penyediaan informasi yang transparan memungkinkan pemilik perusahaan melakukan pengawasan terhadap tindakan manajemen sehingga dapat meminimalkan praktik oportunistik seperti manipulasi laba, penyembunyian risiko, maupun penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan demikian, kualitas transparansi perusahaan sangat menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap integritas manajemen.

Transparansi juga berkaitan erat dengan kualitas disclosure dalam laporan keuangan. Disclosure atau pengungkapan informasi merupakan proses penyampaian informasi yang relevan kepada pengguna laporan keuangan, baik yang bersifat wajib (mandatory disclosure) maupun sukarela (voluntary disclosure). Mandatory disclosure dilakukan untuk memenuhi ketentuan standar akuntansi dan regulasi pasar modal, sedangkan voluntary disclosure dilakukan perusahaan secara sukarela untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas perusahaan di mata publik.

Kualitas disclosure menjadi indikator penting dalam menilai tingkat transparansi perusahaan. Disclosure yang berkualitas ditandai oleh informasi yang lengkap, jelas, konsisten, dan mampu merepresentasikan kondisi ekonomi perusahaan secara substansial. Sebaliknya, disclosure yang rendah dapat menyebabkan distorsi informasi dan menurunkan efektivitas pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, standar pelaporan keuangan seperti IFRS menekankan pentingnya full disclosure guna meningkatkan keterbukaan informasi perusahaan (Fitri et al., 2025)

Dengan demikian, transparansi perusahaan dapat dipahami sebagai elemen penting dalam menciptakan sistem pelaporan keuangan yang kredibel dan akuntabel. Transparansi tidak hanya berperan dalam mengurangi asimetri informasi dan konflik kepentingan, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan investor, meningkatkan efisiensi pasar, serta memperkuat praktik tata kelola perusahaan yang baik.

2.3 Akuntabilitas Perusahaan

Akuntabilitas perusahaan merupakan prinsip yang menekankan kewajiban perusahaan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, keputusan, dan kinerja yang dilakukan kepada para pemangku kepentingan (Kurniasih et al., 2024). Dalam konteks pelaporan keuangan, akuntabilitas diwujudkan melalui penyajian informasi keuangan yang jujur, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Akuntabilitas menjadi elemen penting dalam tata kelola perusahaan karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan kredibilitas perusahaan.

Secara konseptual, akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan yang dipercayakan oleh pemilik modal maupun pihak lain yang berkepentingan. Dalam

hubungan keagenan, manajemen sebagai agent memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai aktivitas perusahaan kepada principal sebagai pemilik perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan menjadi salah satu media utama dalam proses pertanggungjawaban tersebut.

Dengan demikian, akuntabilitas perusahaan merupakan komponen penting dalam sistem pelaporan keuangan modern. Akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, dan menjaga integritas informasi keuangan (Imawan et al., 2019). Oleh sebab itu, penerapan standar pelaporan keuangan yang efektif harus diiringi dengan komitmen etis dan mekanisme pengawasan yang memadai agar tujuan akuntabilitas dapat tercapai secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau studi kepustakaan, yakni sebuah metode penelitian kualitatif yang mengandalkan sumber-sumber tertulis berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi ilmiah lainnya sebagai bahan analisis utama. *Library research* memberikan ruang yang lebih luwes bagi peneliti untuk mengeksplorasi, menginterpretasi, dan mensintesis gagasan-gagasan teoritis secara mendalam dan reflektif. Pendekatan ini dipandang paling sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat konseptual-analitis, yakni membangun pemahaman komprehensif mengenai peran standar pelaporan keuangan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan berdasarkan akumulasi pengetahuan ilmiah yang telah ada (Moleong & Surjaman, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah dari tiga basis data bereputasi, yaitu Google Scholar, SINTA, serta Scopus sebagai salah satu pangkalan data jurnal internasional terindeks bereputasi tinggi. Kriteria pemilihan literatur difokuskan pada artikel-artikel yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2025, dengan pertimbangan bahwa literatur dalam periode tersebut mencerminkan perkembangan pemikiran akademik yang paling mutakhir dan relevan dengan konteks regulasi akuntansi kontemporer. Kata kunci yang digunakan dalam proses penelusuran meliputi istilah-istilah seperti *financial reporting standards*, *transparency*, *accountability*, *IFRS adoption*, *corporate governance*, serta padanannya dalam bahasa Indonesia, guna memastikan cakupan literatur yang memadai dari perspektif lokal maupun global.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap yang saling berkesinambungan. Pertama, peneliti melakukan *reading* awal secara menyeluruh terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran umum mengenai tema dan argumen yang berkembang dalam literatur. Kedua, dilakukan proses *coding* tematik secara manual untuk mengidentifikasi pola-pola konseptual, persamaan pandangan, maupun kontradiksi antar sumber. Ketiga, hasil *coding* tersebut disintesis secara naratif untuk menghasilkan pemahaman yang integratif dan bernilai analitis tinggi. Seluruh proses ini mengacu pada prinsip *critical reading* dan *interpretive synthesis*, di mana peneliti tidak sekadar merangkum isi literatur, melainkan secara aktif menafsirkan, membandingkan, dan membangun argumen konseptual baru berdasarkan temuan dari berbagai sumber yang dikaji (Snyder, 2023). Dengan demikian, metode ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi, tetapi juga sebagai instrumen konstruksi pengetahuan yang sistematis dan ilmiah, sehingga mampu menghasilkan kontribusi teoretis yang orisinal bagi pengembangan ilmu akuntansi dan pelaporan keuangan (Harjanto, 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar pelaporan keuangan pada hakikatnya bukan sekadar seperangkat aturan teknis, melainkan merupakan fondasi epistemologis yang menentukan bagaimana realitas ekonomi sebuah

entitas dikonstruksi dan dikomunikasikan kepada publik. Prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti *relevance*, *reliability*, *comparability*, dan *understandability* menjadi pilar utama yang menjamin bahwa informasi keuangan yang disajikan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan. Meskipun prinsip-prinsip tersebut telah lama diakui keberadaannya, tantangan dalam implementasinya tetap nyata, terutama ketika ketidakkonsistenan penerapan konsep akuntansi dan perbedaan antara standar yang berlaku menjadi hambatan struktural yang sulit diatasi tanpa strategi yang tepat sasaran (Meilani et al., 2025). Pada titik inilah peran standar pelaporan keuangan menjadi sangat krusial, yakni sebagai instrumen penyeragaman yang memastikan informasi keuangan dapat dibandingkan dan diinterpretasikan secara lintas entitas maupun lintas periode.

Secara konseptual, transparansi pelaporan keuangan merupakan kondisi di mana informasi yang tersaji dapat dipahami, diakses, dan diverifikasi oleh berbagai pemangku kepentingan secara setara. Studi yang dilakukan oleh Langella et al. (2023) mengungkapkan temuan yang menarik sekaligus paradoks: pemberian klarifikasi atas jargon teknis dan representasi visual dalam laporan keuangan terbukti meningkatkan pemahaman warga atas informasi keuangan, namun kombinasi keduanya secara simultan tidak memberikan manfaat tambahan yang signifikan. Lebih jauh, penelitian tersebut menemukan bahwa individu yang merasa paling memahami informasi keuangan justru memiliki tingkat pemahaman aktual yang paling rendah, sebuah fenomena yang menandakan bahwa *transparency by design* tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi publik yang diharapkan.

Sintesis dari berbagai temuan dalam bab ini mengarahkan pada satu simpulan konseptual yang penting yaitu transparansi pelaporan keuangan tidak dapat diperlakukan sebagai variabel tunggal yang berdiri sendiri, melainkan merupakan produk dari interaksi kompleks antara kualitas standar, desain penyajian informasi, dan kapasitas pemahaman pengguna laporan. Upaya memperkuat transparansi melalui penyederhanaan bahasa teknis dan visualisasi data memang terbukti efektif secara parsial, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konteks pengguna dan tingkat literasi keuangan yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengembangan standar pelaporan keuangan ke depan perlu mempertimbangkan aspek aksesibilitas informasi secara lebih serius, dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar akuntansi seperti *understandability* dan *comparability* tidak hanya terpenuhi secara normatif, tetapi juga dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan pengguna laporan keuangan, mulai dari investor institusional hingga masyarakat umum yang turut berkepentingan terhadap kondisi keuangan suatu entitas (Langella et al., 2023; Meilani et al., 2025).

4.1 Peran Akuntansi sebagai Mekanisme Penjamin Kualitas Informasi dan Akuntabilitas

Akuntansi dalam konteks modern tidak dapat lagi dipahami secara sempit hanya sebagai aktivitas pencatatan transaksi keuangan. Fungsinya telah berkembang menjadi mekanisme strategis yang menjamin kualitas informasi, menstandarisasi pelaporan, serta memvalidasi pertanggungjawaban manajemen melalui proses audit internal yang terstruktur. Transisi menuju akuntansi berbasis *accrual* yang kini diadopsi secara luas semakin memperkuat posisi akuntansi sebagai instrumen akuntabilitas, karena pendekatan ini memungkinkan penyajian informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi keuangan entitas secara keseluruhan, bukan hanya arus kas yang terjadi pada periode tertentu. Kombinasi antara praktik akuntansi yang baik, landasan teori yang kokoh, dan audit yang efektif terbukti berkontribusi pada transparansi yang mendukung keberlanjutan dan kinerja jangka panjang perusahaan (Ditya et al., 2025).

Akuntabilitas sebagai konsep yang berpasangan dengan transparansi tidak dapat diwujudkan secara optimal tanpa dukungan sistem pelaporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan yang ditandai oleh relevansi, keandalan, kejelasan, dan keterbandingan informasi terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap terwujudnya transparansi organisasi, dan hubungan ini bersifat saling memperkuat baik dalam konteks pemerintahan, sektor swasta, maupun

organisasi nirlaba (Siregar & Wardany, 2025). Dengan kata lain, upaya peningkatan akuntabilitas organisasi tidak dapat dipisahkan dari agenda perbaikan kualitas laporan keuangan secara berkelanjutan, karena laporan yang berkualitas merupakan prasyarat bagi berjalannya proses pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif.

Memahami akuntansi sebagai mekanisme penjamin kualitas informasi sekaligus instrumen akuntabilitas mengharuskan kita untuk melihatnya secara lebih holistik, melampaui sekadar fungsi teknisnya sebagai pencatat transaksi. Dalam kerangka yang lebih luas, akuntansi berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara manajemen dan pemangku kepentingan, dan kualitas jembatan tersebut sangat ditentukan oleh seberapa konsisten prinsip-prinsip yang mendasarinya diterapkan dalam praktik sehari-hari. Ketika prinsip dasar akuntansi diterapkan secara disiplin dan didukung oleh audit internal yang ketat, kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan akan meningkat secara organik, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi organisasi di mata publik. Sebaliknya, inkonsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya merusak kualitas informasi yang disajikan, tetapi juga berpotensi menciptakan celah yang dimanfaatkan untuk tujuan manipulatif yang merugikan banyak pihak. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas organisasi melalui pelaporan keuangan yang berkualitas merupakan agenda yang tidak dapat ditangguhkan, terutama di tengah meningkatnya tuntutan *good corporate governance* dari berbagai kalangan pemangku kepentingan (Ditya et al., 2025; Siregar & Wardany, 2025).

4.2 Faktor Institusional yang Memengaruhi Efektivitas Implementasi Standar Pelaporan Keuangan

Efektivitas implementasi standar pelaporan keuangan tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas standar itu sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor institusional yang melingkupinya. Penelitian empiris menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, penerapan standar akuntansi, kompetensi sumber daya manusia, dan peran auditor internal secara bersama-sama membentuk ekosistem yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Menariknya, dari kelima faktor yang diteliti, hanya kompetensi sumber daya manusia yang secara konsisten menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sebuah temuan yang selaras dengan perspektif *Agency Theory* bahwa agen yang kompeten adalah kunci dalam mereduksi *information asymmetry* (Anto & Yusran, 2023). Temuan ini menggarisbawahi bahwa implementasi standar yang baik sekalipun tidak akan optimal tanpa pelaksana yang memiliki kapasitas memadai.

Senada dengan perspektif tersebut, penelitian Yenni et al. (2024) yang menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) secara eksplisit menegaskan bahwa hanya kompetensi sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, sementara implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal membutuhkan *human agency* untuk dapat mengoperasionalkan norma-norma institusional secara efektif. Temuan ini sekaligus merefleksikan relevansi *Institutional Theory* dalam memahami dinamika pelaporan keuangan, di mana tekanan-tekanan dari lingkungan institusional baik yang bersifat koersif, mimetik, maupun normatif tidak serta merta menghasilkan kepatuhan substantif terhadap standar yang berlaku tanpa dukungan kapasitas manusia yang memadai.

Implikasi dari temuan mengenai faktor-faktor institusional ini sesungguhnya membawa pesan yang lebih dalam dari sekadar persoalan teknis implementasi standar. Fakta bahwa kompetensi sumber daya manusia secara konsisten muncul sebagai faktor paling determinan dalam berbagai penelitian mengindikasikan bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas akuntan dan pengelola keuangan merupakan prioritas strategis yang tidak dapat diabaikan oleh organisasi manapun. Standar akuntansi yang paling canggih sekalipun hanya akan menjadi dokumen normatif tanpa makna substantif apabila tidak dioperasionalkan oleh individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman mendalam atas tujuan pelaporan keuangan yang sesungguhnya. Selain itu, tekanan institusional yang bersifat koersif dari regulator perlu diimbangi dengan pembangunan kesadaran normatif di kalangan praktisi akuntansi, sehingga kepatuhan terhadap standar pelaporan

tidak hanya bersifat *compliance-driven* tetapi juga *value-driven* yang berakar pada komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas yang tulus (Anto & Yusran, 2023; Yenni et al., 2024).

4.3 Ancaman terhadap Transparansi: Praktik *Creative Accounting* dan Asimetri Informasi

Salah satu ancaman terbesar terhadap efektivitas standar pelaporan keuangan dalam mendorong transparansi adalah praktik *creative accounting*, yakni manipulasi laporan keuangan yang dilakukan dalam batas-batas yang secara formal masih dapat dibenarkan oleh standar yang ada. Fenomena ini telah menarik perhatian akademisi selama beberapa dekade, terutama karena dampaknya yang signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan di sektor perbankan dan korporat secara luas. Penelitian Abed et al. (2022) mengungkapkan bahwa tingkat dampak dari determinan *creative accounting* sangat terkait dengan aspek transparansi dan *disclosure*, sehingga penguatan kedua aspek tersebut secara moderasi terbukti mampu mengurangi dampak negatif praktik manipulasi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Temuan ini menegaskan bahwa transparansi dan *disclosure* bukan hanya tujuan akhir pelaporan keuangan, tetapi juga merupakan mekanisme perlindungan terhadap distorsi informasi.

Dari perspektif hukum, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan tidak hanya menimbulkan risiko finansial bagi pemangku kepentingan seperti investor dan kreditur, tetapi juga menciptakan kondisi *information asymmetry* yang mengganggu efisiensi pasar secara sistemik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaporan keuangan menjadi instrumen penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar transparansi yang berlaku, dan kerangka hukum yang ada perlu terus diperkuat agar mampu merespons semakin canggihnya praktik pelanggaran yang terjadi (Az'zahra et al., 2024). Dimensi hukum ini menjadi pelengkap penting dari dimensi teknis akuntansi, karena tanpa sanksi yang tegas dan mekanisme *enforcement* yang efektif, standar pelaporan keuangan berpotensi hanya menjadi dokumen normatif yang kehilangan daya ikat substantifnya.

Ancaman *creative accounting* dan *information asymmetry* terhadap integritas pelaporan keuangan pada akhirnya menuntut respons yang bersifat multidimensi, tidak cukup hanya mengandalkan pengetatan regulasi teknis akuntansi semata. Dimensi hukum yang mencakup penegakan sanksi terhadap pelanggaran pelaporan keuangan perlu berjalan seiring dengan penguatan mekanisme *disclosure* yang mempersempit ruang bagi manajemen untuk menyembunyikan informasi material dari publik. Pada tataran yang lebih dalam, persoalan ini sesungguhnya mencerminkan ketegangan mendasar antara kepentingan manajemen yang kerap berorientasi pada optimalisasi gambaran kinerja jangka pendek dengan kepentingan pemangku kepentingan yang membutuhkan gambaran kondisi keuangan yang akurat dan komprehensif. Ketegangan ini hanya dapat dikelola secara efektif apabila standar pelaporan keuangan dirancang dengan mempertimbangkan potensi penyalahgunaannya, sehingga fleksibilitas yang diberikan kepada manajemen dalam interpretasi standar tidak menjadi pintu masuk bagi praktik yang merugikan kepentingan publik secara lebih luas (Abed et al., 2022; Az'zahra et al., 2024).

4.4 Harmonisasi Standar dan Pemanfaatan Teknologi sebagai Strategi Penguatan Transparansi Kontemporer

Dalam lanskap keuangan global yang semakin terintegrasi, harmonisasi standar pelaporan keuangan menjadi agenda strategis yang tidak dapat ditunda. Studi mengenai harmonisasi standar akuntansi Islam dengan prinsip-prinsip syariah menunjukkan bahwa perbedaan antara *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan, memiliki implikasi signifikan terhadap transparansi dan keterbandingan laporan keuangan. Lembaga-lembaga yang mengadopsi integrasi seimbang antara standar global dan pedoman berbasis syariah terbukti menampilkan informasi keuangan yang lebih kredibel, pengungkapan risiko yang lebih baik, serta kepercayaan publik yang lebih kuat sebuah bukti bahwa harmonisasi bukan sekadar

penyesuaian teknis, melainkan proses institusional dan normatif yang menghubungkan praktik keuangan global dengan nilai-nilai lokal (Nuraini et al., 2026).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital khususnya *Big Data Analytics* membuka cakrawala baru dalam upaya peningkatan transparansi laporan keuangan. Teknologi ini terbukti mampu mendeteksi ketidaksesuaian dalam pelaporan secara *real-time*, mempercepat proses audit, serta meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pelaporan yang berlaku. Lebih dari itu, otomatisasi berbagai proses akuntansi melalui *Big Data Analytics* berpotensi mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual yang rentan terhadap kesalahan dan manipulasi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih efisien secara operasional sekaligus lebih akuntabel secara substantif (Khusna et al., 2025). Dengan demikian, integrasi antara harmonisasi standar dan adopsi teknologi mutakhir merupakan strategi transformasional yang paling menjanjikan dalam memperkuat sistem pelaporan keuangan yang transparan dan terpercaya di era kontemporer.

Konvergensi antara harmonisasi standar akuntansi dan adopsi teknologi mutakhir pada akhirnya merepresentasikan arah masa depan sistem pelaporan keuangan yang paling menjanjikan dalam menjawab tantangan transparansi dan akuntabilitas di era digital. Namun demikian, perlu dipahami bahwa teknologi dan harmonisasi standar hanyalah *enabler*, bukan solusi tunggal yang secara otomatis menyelesaikan persoalan mendasar dalam pelaporan keuangan. Keberhasilan transformasi ini tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi dan mengoperasikan teknologi baru, serta kemauan institusional untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak lagi relevan. Dalam konteks keuangan syariah misalnya, harmonisasi antara IFRS dan AAOIFI membuktikan bahwa integrasi nilai-nilai lokal dengan standar global bukanlah kontradiksi, melainkan sumber kekuatan yang memperkaya kualitas pelaporan dan memperluas kepercayaan pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang. Dengan fondasi yang demikian, sistem pelaporan keuangan masa depan berpotensi menjadi instrumen yang tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga bermakna secara sosial dan etis bagi seluruh ekosistem bisnis yang menggantungkan kepercayaannya pada integritas informasi keuangan (Khusna et al., 2025; Nuraini et al., 2026).

5. KESIMPULAN

Kajian konseptual ini menegaskan bahwa standar pelaporan keuangan memiliki peran sentral dalam membangun ekosistem transparansi dan akuntabilitas korporat yang berkelanjutan. Implementasi standar seperti IFRS tidak secara otomatis menjamin kualitas pelaporan yang optimal apabila tidak didukung oleh faktor-faktor institusional yang memadai, terutama kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal yang efektif, serta mekanisme enforcement hukum yang tegas. Praktik *creative accounting* terbukti menjadi ancaman laten yang mampu mendistorsi substansi transparansi meskipun secara formal perusahaan telah mematuhi standar yang berlaku. Di sisi lain, harmonisasi standar akuntansi global dengan nilai-nilai lokal serta pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics* membuka peluang transformasional dalam memperkuat integritas pelaporan keuangan kontemporer. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas sejati hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan yang bersifat integratif, mencakup dimensi teknis, institusional, hukum, dan teknologi secara bersamaan.

Berdasarkan hasil kajian ini, beberapa rekomendasi strategis perlu dipertimbangkan secara serius oleh berbagai pemangku kepentingan. Pertama, regulator dan pembuat kebijakan perlu merancang mekanisme enforcement yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika praktik akuntansi yang terus berkembang, khususnya dalam mengantisipasi modus *creative accounting* yang semakin canggih. Kedua, organisasi perlu menginvestasikan sumber daya secara berkelanjutan dalam pengembangan kompetensi akuntan dan auditor internal, karena kapasitas manusia terbukti menjadi faktor paling determinan dalam keberhasilan implementasi standar pelaporan. Ketiga, adopsi teknologi *Big Data Analytics* perlu didorong sebagai bagian dari strategi digitalisasi

pelaporan keuangan yang komprehensif. Keempat, penelitian empiris lanjutan sangat diperlukan untuk menguji proposisi-proposisi konseptual yang dihasilkan kajian ini, khususnya dalam konteks entitas bisnis di negara berkembang yang memiliki karakteristik institusional yang unik dan kompleks

DAFTAR PUSTAKA

- Abed, I. A., Hussin, N., Haddad, H., Al-Ramahi, N. M., & Ali, M. A. (2022). The Moderating Impact of the Audit Committee on Creative Accounting Determination and Financial Reporting Quality in Iraqi Commercial Banks. *Risks*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/risks10040077>
- Ahmed, A. S., & Duellman, S. (2022). Accounting conservatism and board of director characteristics: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Economics*, 43(2), 411–437. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.01.005>
- Alvionita, N., Kamila, A. C., Lusianti, Alfitri, S., & Febriyanti, R. (2025). Peran transparansi laporan keuangan kepada pihak eksternal dalam meminimalisir asimetri informasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(2), 1–7.
- Anita, N. (2026). Tinjauan literatur tentang penerapan IFRS dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 1(1), 31–47.
- Anto, L. O., & Yusran, I. N. (2023). Determinants of the Quality of Financial Reports. *International Journal of Professional Business Review*, 8(3), 1–40. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8955981>
- Az'zahra, M. H., Wahyuningsih, T. L., Atriani, D., Alif Savitri, P., & Lorenzo Stefano, J. (2024). Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Hukum Terhadap Kurangnya Transparansi Serta Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dalam Suatu Perusahaan. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), 88. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11541497>
- Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. H. (2023). International Accounting Standards and Accounting Quality. *Journal of Accounting Research*, 46(3), 467–498. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2008.00287.x>
- Budi, H., & Sumarni. (2026). Pengaruh Isomorfisme Institusional terhadap Praktik Tata Kelola Perusahaan dengan Tekanan Regulasi pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 4(02), 378–389. <https://doi.org/10.58812/smb.v4i02>
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Zha, J. (2021). Stock prices and earnings: A history of research. *Annual Review of Financial Economics*, 6, 343–363. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110613-034522>
- Dewi, I. P., Ariani, K. R., & Kurniawati, L. (2025). Pengungkapan Sustainability Report: Peran Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9(1), 61–79. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.24877>
- Ditya, N. T., Puspitasari, S., Harahap, A. R., Syakirah, N., & Ikhsan, S. (2025). Peran akuntansi dalam meningkatkan transparansi dan kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 631–636.
- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi prinsip good corporate governance dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 134–149.
- Fitri, A., Ningsih, J., Dari, A. D. U., Ramadhan, N. I., & Yusri, A. (2025). Implementasi PSAK berbasis IFRS di Indonesia: Dampak, tantangan, dan relevansi global. *Jurnal A.N.C*, 1(1), 175–186.
- Harjanto, K. (2024). The Analysis of Financial Reporting Quality and Firm Value. *Copernican Journal of Finance & Accounting*, 12(3), 27–41. <https://doi.org/10.12775/cjfa.2023.014>
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (2022). A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting. *SSRN Electronic Journal*, November. <https://doi.org/10.2139/ssrn.156445>
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 10(1), 156–175.
- Khusna, T., Fransiska, M., Karimah, N. A., & Arwani, A. (2025). Peran Big Data Analytics dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Syariah. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 13–26. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/10607>
- Knezevic, M. N., Petrovic, M. D., Kovacic, S., Mijatov, M., Vukovi, D. B., & Kennel, J. (2021). Acting the part: Emotional intelligence and job satisfaction as predictors of emotional labor in travel agencies. *Tourism and Hospitality Research*, 21(2). <https://doi.org/10.1177/1467358420965653>

- Kurniasih, M., Bahari, A. W., Kusfianto, E., Ratissa, S. B., Wakem, O. F., & Yan Go, M. S. Y. M. (2024). Penerapan prinsip akuntabilitas corporate governance pada perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI). *Jurnal Manajemen, Bisnis & Akuntansi*, 1(2), 73–77.
- Langella, C., Anessi-Pessina, E., Botica Redmayne, N., & Sicilia, M. (2023). Financial reporting transparency, citizens' understanding, and public participation: A survey experiment study. *Public Administration*, 101(2), 584–603. <https://doi.org/10.1111/padm.12804>
- Meilani, F. A., Panggabean, N. S., Octavia, Y., Ani, P., & Darma, J. (2025). Prinsip Dasar Akuntansi: Konsep, Tantangan, dan Implikasinya dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2234–2255. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4958596>
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya. <https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ>
- Nuraini, N., Siska Asriana, & Masyhuri, M. (2026). Analisis Harmonisasi Standar Akuntansi Syariah dengan Prinsip Syariah untuk Memperkuat Transparansi Pelaporan Keuangan Modern. *Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(3), 92–99. <https://doi.org/10.65310/yqfd1k64>
- Purba, T. S. A., Simbolon, R. D., Simbolon, A. M., Sianipar, Y. S., & Aruan, H. M. G. P. (2025). Standar akuntansi keuangan (SAK) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1322–1330.
- Putri, D. C. P., Damayanti, W. A., & Lutfianti, A. (2024). Peran hukum dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas tata kelola perusahaan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 202–208.
- Putri, D. D., & Yustisi, Y. P. (2022). Mekanisme tata kelola internal dan pengungkapan antikorupsi perusahaan di Indonesia. *Jurnal Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 1245–1254.
- Ramli, D. L., Herlintang, M., Zaskia, R. S., Khoirunnisa, L., & Salsabila, Z. (2025). Analisis komparatif standar akuntansi keuangan internasional (IFRS) dan standar akuntansi keuangan Indonesia. *Jurnal Akademik Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 691–702. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.5212>
- Rika, M., Retnoningsih, K., Syathira, I. S., Pattiasina, V., & Astuti, S. Y. (2025). Dampak penerapan IFRS terhadap transparansi laporan keuangan di perusahaan publik. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(3), 4438–4449. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i3.1875>
- Ritonga, P. (2024). Transparansi dan akuntabilitas: Peran audit dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder. *Equilibrium*, 13(2), 323–336.
- Saeed, M. M., Kumari, M., & Mudliar, M. (2026). International Financial Reporting Standards adoption and accounting quality in emerging economies. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 18(1), 1–21. <https://doi.org/10.1504/IJMFA.2026.150659>
- Siregar, M. A. R., & Wardany, S. (2025). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 7424–7431. <https://doi.org/10.63822/fe30rg74>
- Snyder, H. (2023). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Yenni, E., Junaedi, A. T., & Wijaya, E. (2024). The Impact of Government Accounting Standards Implementation, Internal Control Systems, and Human Resource Competence on Regional Financial Report Quality. *Journal of Applied Business and Technology*, 5(3), 134–145. <https://doi.org/10.35145/jabt.v5i3.182>
- Zhang, C., Sun, Y., Xu, D., & Liu, Q. (2026). Digital transformation and enterprise value creation: A study based on both human capital upgrading and pay gap optimization. *International Review of Economics & Finance*, 106, 104964. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.104964>